

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja

Sendy Santika¹, Cris Kuntadi², R. Luki Kurnia³

¹ Politeknik STIA LAN Jakarta, email: sendy1388@gmail.com

² Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, email: cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

³ Politeknik STIA LAN Jakarta, email: luki@stialan.ac.id

**Corresponding author: Sendy Santika¹*

Abstrak: Penyerapan anggaran belanja menjadi salah satu penilaian dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pemerintah. Masalah klasik dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah masih terjadi pada saat ini yaitu belum optimalnya penyerapan anggaran. Artikel ini mereviu faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran belanja sebagai variabel dependen terhadap pengadaan barang dan jasa, kualitas sumber daya manusia, dan pencatatan administrasi sebagai variabel independen dalam suatu studi literatur manajemen keuangan negara. Artikel ini merupakan *literature review* yang bertujuan membangun hipotesis pengaruh antar variabel untuk digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel *literature review* ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa, kualitas sumber daya manusia, dan pencatatan administrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja.

Keyword: Penyerapan Anggaran Belanja, Pengadaan Barang dan Jasa, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pencatatan Administrasi, *Literature Review*.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-5/PB/2022 mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga, IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam suatu pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja pada setiap Kementerian Negara/Lembaga utamanya yaitu dari segi kualitas penerapan perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

“Aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satuan Kerja (Satker) dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Salah satu aspek ini yaitu penyerapan anggaran, indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan yang dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Target yang terserap untuk Belanja Barang adalah minimum 15 persen pada triwulan I, lalu sampai dengan 50 persen pada triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV atau di akhir tahun. Sedangkan target serapan anggaran untuk Belanja Modal adalah minimum 10 sampai dengan 40 persen di semester I dan 70 persen sampai dengan 90 persen sampai dengan akhir tahun. Target penyerapan anggaran ini dapat berubah sesuai dengan komposisi alokasi anggaran per jenis belanja pada setiap akhir periode triwulanan berkenaan” (Putri, 2022).

Pada praktiknya penyerapan anggaran pada pemerintah masih banyak menumpuk pada triwulan IV tahun anggaran berjalan. Pada akhir tahun fiskal, sejumlah tagihan sering kali dibayar. Mengumpulkan angsuran atau tagihan menjelang akhir tahun dapat dibilang ialah

hal yang rutin dilakukan. Meski ada dorongan membelanjakan uang sesegera mungkin, banyak departemen pemerintah masih cenderung menggunakan anggaran mereka pada akhir tahun fiskal. Menurut pendapat Irianto (2021) menyatakan, bahwa “peningkatan penarikan belanja di akhir tahun dilakukan mengingat anggaran yang tidak terserap akan kembali ke kas negara dan tidak bisa dibelanjakan lagi oleh pengguna anggaran”. Hal ini menjadikan banyak opini dari sebagian masyarakat bahwa ada yang beranggapan penumpukan belanja ini terindikasi suatu pemborosan. Penumpukan penyerapan anggaran ini juga bukan tidak mungkin rawan dengan aksi belanja yang tidak sesuai atau fiktif. Dari berbagai pihak tertentu memberikan saran atau pendapatnya anggaran yang belum terpakai akan dikembalikan ke penyimpanan negara dan bukan dibelanjakan secara samar-samar untuk mencapai sasaran penyerapan anggaran itu sendiri. Target penyerapan adalah bagian kecil dari siklus anggaran serta membahas retensi, taraf perencanaan serta taraf pelaksanaan anggaran memainkan peran sangat menarik “Selain faktor perencanaan dan pelaksanaan anggaran, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu pengadaan barang dan jasa. Pengeluaran barang dan jasa merupakan aspek selanjutnya yang mempengaruhi penggunaan anggaran secara *aggregate*” (Kuntadi dan Nugroho, 2023) “Faktor lainnya dalam menunjang penyerapan anggaran adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kurangnya SDM mulai dari SDM yang tidak berkualitas, kurangnya pembinaan dari pemerintah pusat, keengganan pegawai untuk ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dan sulitnya mendapatkan pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa merupakan permasalahan yang terjadi dalam proses penyerapan anggaran terkait pengadaan barang dan jasa” (Yanuriza et al, 2019). Karena SDM ialah hal yang esensial untuk tiap instansi, maka perlu dikelola, diatur, dan digunakan secara produktif guna meraih tujuan organisasi.

“Pencatatan administrasi menjadi salah satu permasalahan yang terjadi dari tercapainya suatu penyerapan anggaran. Administrasi melingkupi seluruh rangkaian kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan Bersama” (Kennedy et al, 2020)

Merujuk dari fenomena di atas terkait permasalahan penyerapan anggaran, maka penulis dalam artikel ini membahas elemen yang memberi dampak penyerapan anggaran belanja. Pada hal ini elemen pengadaan barang serta jasa, kualitas SDM, dan pencatatan administrasi, suatu studi *literature review* pada bidang manajemen keuangan negara.

Rumusan Masalah

Atas dasar landasan tersebut, bisa dibentuk isu-isu yang akan diteliti untuk spekulasi pemeriksaan tambahan, lebih spesifiknya:

1. Apakah pengadaan barang serta jasa berdampak atas penyerapan anggaran belanja?
2. Apakah kualitas SDM berdampak atas penyerapan anggaran belanja?
3. Apakah pencatatan administrasi berdampak atas penyerapan anggaran belanja?

KAJIAN TEORI

Penyerapan Anggaran Belanja

Menurut Sulistyowati, Farihah, dan Hartadinata (2020) “anggaran merupakan perencanaan yang disusun secara terpadu dan dijelaskan secara kuantitatif selama periode tertentu atau sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Anggaran disusun untuk membantu manajemen dalam meminimalisasi risiko ketidakpastian di masa yang akan

datang. Anggaran juga merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan secara komprehensif”.

Selanjutnya, “belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dalam periode tahun anggaran berjalan yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan pemerintah tidak akan memperoleh pembayarannya kembali. Belanja negara merupakan salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan” (Syamsuddin et al, 2022).

Menurut Halim (2014), “bahwa penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran)”. “Begitu juga dalam konteks pemerintah daerah, penyerapan anggaran merupakan gambaran kecakapan pemerintah daerah pada saat menjalankan dan memberikan pertanggungjawaban pada tiap aktivitas yang merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang telah dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah” (Rahmawati, 2020). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran belanja merupakan suatu realisasi dari anggaran baik pemerintah pusat maupun daerah dari semua pengeluaran pada periode tertentu.

Penyerapan anggaran belanja ini telah banyak dilaksanakan studi oleh peneliti terdahulu antaranya ialah (Kuntadi dan Nugroho, 2023), (Kuntadi dan Rosdiana, 2022), dan (Yosafat dan Halim, 2022).

Pengadaan Barang dan Jasa

Agus (2018), “pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang prosesnya dimulai dari menentukan kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara sehingga perlu pemahaman atas pengaturan tata kelola (*good governance*) dan akuntabilitasnya. Pengadaan barang dan jasa berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional.”

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Zulaikah dan Burhany (2019) bahwa “pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh pemerintah termasuk oleh pemerintah daerah, karena pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah membutuhkan dukungan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa ini akan mempengaruhi terjadinya penyerapan pada anggaran pemerintah. Semakin banyak pengadaan barang dan jasa yang dilakukan maka otomatis penyerapan anggaran pun akan semakin banyak. Demikian pula sebaliknya, semakin sedikit pengadaan barang dan jasa yang dilakukan maka otomatis penyerapan anggaran pun akan semakin sedikit”.

Pengadaan barang serta jasa telah banyak dilangsungkan peneliti terdahulu antaranya ialah (Rahmawati dan Ishak, 2020), (Ramadhani dan Setiawan, 2019), dan (Zulaikah dan Burhany, 2019).

Kualitas Sumber Daya Manusia

SDM ialah sosok yang vital untuk kemajuan suatu substansi atau perkumpulan. Hasil yang diperoleh tidak seluruhnya ditentukan oleh sifat SDM yang dimilikinya. Kennedy et al (2020) “keterampilan individu merupakan nilai tambah bagi orang-orang dalam melakukan pekerjaan”. “Pengembangan SDM berfokus pada upaya untuk menyediakan kesempatan dan memfasilitasi pengembangan belajar para pegawai dalam hal ini Aparatur Sipil Negara

(ASN), yang meliputi program-program pendidikan dan pelatihan yang mencakup perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi” (Ahwan, 2022).

Hal ini diperkuat pendapat dari Tamrin dan Gunawan (2021) yaitu “salah satu manfaat utama penggunaan kompetensi dalam organisasi adalah menggerakkan SDM ke arah target yang ingin dicapai suatu organisasi. Selain itu, kompetensi akan mendorong karyawan untuk mendapatkan dan menerapkan *skill* dan *knowledge* sesuai kebutuhan pekerjaan, karena hal ini merupakan instrument bagi pencapaian targetnya. Untuk itu sistem pengembangan SDM di organisasi haruslah berdasarkan kompetensi.”

Kerangka tersebut harus dikoordinasikan mulai dari pendaftaran, pengaturan individu, ujian pelaksanaan, kerangka gaji, dan peningkatan profesi. Bagi pemerintah, tujuan yang dicapai adalah bantuan pemerintah daerah, khususnya bantuan tersebut dibantu melalui retensi rencana belanja konsumsi untuk proyek dan pelaksanaan yang telah direncanakan dalam APBN.

Kualitas SDM telah banyak dilaksanakan studi oleh peneliti antaranya ialah (Ramopolii et al, 2022), (Syahwildan dan Damayanti, 2022), dan (Tamrin dan Gunawan, 2021).

Pencatatan Administrasi

“Administrasi dalam arti sempit adalah keseluruhan aktivitas yang bersifat ketatausahaan, yaitu mencakup kegiatan surat-menyurat, mulai dari pencatatan atau agenda surat masuk dan surat keuar, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, dan pengarsipan surat, termasuk pencatatan dan pengolahan data dan informasi yang diperlukan pimpinan dalam rangka penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan tugas dan fungsi organisasi” (Banga, 2018).

Hal ini di kemukakan juga oleh Kennedy et al (2020), bahwa “administrasi adalah rangkaian kegiatan klerikal, kegiatan kerja, perbuatan, dan kegiatan yang bermacam-macam yang biasa dilakukan secara berulang kali sesuai pada kerangka yang sama untuk mencapai tujuannya. Pada masanya, administrasi dinilai sebagai suatu profesi yang dikenal dengan administrator, baik yang bekerja di lingkungan pemerintahan maupun swasta”.

“Administrasi dibutuhkan oleh tiap organisasi ataupun perusahaan. Administrasi berpengaruh dalam hal perencanaan serta *output* kegiatan, demi tercapainya tujuan bersama. Setidaknya ada tiga tujuan administrasi, yaitu untuk memantau kegiatan atau data milik organisasi maksudnya adanya administrasi membantu organisasi untuk memantau dan senantiasa memperhatikan kegiatan atau data yang dimilikinya. Selain untuk memantau, administrasi juga dibutuhkan untuk melakukan evaluasi, misalnya evaluasi kebijakan, kegiatan, rencana, atau hal lainnya. Selain itu juga Administrasi bertujuan untuk membantu penyusunan program kegiatan dan pengembangannya, agar sejalan dengan yang diinginkan organisasi tersebut” (Putri dan Gischa, 2021).

Pencatatan administrasi telah banyak dilaksanakan studi oleh peneliti terdahulu, antaranya ialah (Kennedy et al, 2020) dan (Yanuriza et al, 2019).

Tabel 1
Penelitian terdahulu yang relevan

No	Author (tahun)	Hasil Riset terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1	Cris Kuntadi dan Didiet Adi Nugroho (2023)	“Perencanaan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Serta Partisipasi Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran”	“Pengadaan Barang dan Jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja”	“Kualitas SDM, Pencatatan Administrasi, Perencanaan Anggaran, dan Partisipasi Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja”
2	Cris Kuntadi dan Dian Rosdiana (2022)	“Perencanaan Anggaran, Peraturan, dan Koordinasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan”	-	“Pengadaan Barang dan Jasa, Kualitas SDM, Pencatatan Administrasi, Perencanaan Anggaran, Peraturan, dan Koordinasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja”
3	Reza Yosafat CH dan Abdul Halim (2022)	“Perencanaan, Revisi Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Peraturan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja”	“Pengadaan Barang dan Jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja”	“Kualitas SDM, Pencatatan Administrasi, Perencanaan, Revisi Anggaran, dan Peraturan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja”
4	Rika Septi Rahmawati dan Jouzar Farouq Ishak (2020)	“Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Regulasi, SDM, Pengadaan Barang dan Jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja”	“Pengadaan Barang dan Jasa dan Kualitas SDM berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran Belanja”	“Pencatatan Administrasi, Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja”

5	Rifka Ramadhani dan Mia Angelina Setiawan (2019)	“Regulasi, Perencanaan Anggaran, dan Pengadaaan Barang dan Jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja”	“Pengadaan Barang dan Jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja”	“Kualitas SDM, Pencatatan Administrasi, Regulasi, dan Perencanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja”
6	Binti Zulaikah dan Dian Imanina Burhany (2019)	“Perencanaan, Pelaksanaan, SDM, dan Pengadaan Barang dan Jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penumpukan Penyerapan Anggaran”	“Pengadaan Barang dan Jasa dan Kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja”	“Pencatatan Administrasi, Perencanaan, Pelaksanaan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja”
7	Jingsi Virginia Ramopolii, Paulina Van Rate, dan Joubert B. Maramis (2022)	“Pengadaan Barang dan Jasa, Ganti Uang Persediaan, Pencatatan Administrasi, Dokumen Perencanaan, Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran”	“Pengadaan Barang dan Jasa, Kualitas SDM, dan Pencatatan Administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja”	“Ganti Uang Persediaan dan Dokumen Perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja”
8	Muhamad Syahwildan dan Irma Damayanti (2022)	“Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, dan Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran”	“Kualitas SDM dan Pencatatan Administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja”	“Pengadaan Barang dan Jasa, Perencanaan Anggaran, dan Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja”
9	Muhammad Tamrin dan Hendra Gunawan (2021)	“Perencanaan dan Kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran”	“Kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja”	“Pengadaan Barang dan Jasa, Pencatatan Administrasi, dan Perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja”
10	Kennedy, Nur Azlina, Julita, dan Suci Nurulita (2020)	“Perencanaan Anggaran, Kualitas SDM, Komitmen Organisasi, Pencatatan Administrasi, dan	“Kualitas SDM dan Pencatatan Administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap	“Pengadaan Barang dan Jasa, Perencanaan Anggaran, Komitmen Organisasi, dan Sistem Pengendalian Intern

		Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran”	Penyerapan Anggaran Belanja”	Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja”
11	Yanuriza, Amir Hasan, dan M. Rasuli (2019)	“Perencanaan Anggaran, Catatan Adminiatrasi, SDM, dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran”	“Kualitas SDM dan Pencatatan Administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja”	“Pengadaan Barang dan Jasa, Perencanaan Anggaran, Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja”

METODE PENELITIAN

Artikel ilmiah ini ditulis dengan memakai metodologi kualitatif dan penelitian kepustakaan (*library study*/eksplorasi perpustakaan). Memakai teori, efek, serta korelasi variabel perpustakaan offline dan online, buku, jurnal, serta alat online lain yang ditemukan oleh *Google Scholar* dan *Mendeley*, mengkaji teori serta korelasi atau dampak tiap variabel dari sumber perpustakaan.

Pada penelitian dengan metode kualitatif ini, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan struktur metodologis. “Semua data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif berdasarkan pendapat para ahli sebagai landasan teori. Hal ini dapat didefinisikan bahwa metode ini harus digunakan secara induktif sehingga ada batasan terkait pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat mengeksplor terhadap banyak hal yang terkait” (Ali dan Limakrisna, 2013).

PEMBAHASAN

Pembahasan tinjauan pustaka artikel ini di bidang Pengelolaan Keuangan Negara didasarkan pada kajian teoritis dan penelitian terdahulu yang relevan:

1. Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Penyerapan anggaran belanja dipengaruhi oleh pengadaan barang dan jasa, artinya proses pengadaan akan berdampak signifikan terhadap penggunaan anggaran tersebut. Semakin besar perolehan tenaga kerja dan produk yang dilakukan, semakin banyak retensi anggaran yang akan meningkat. Demikian pula, jika hanya ada sedikit perolehan tenaga kerja dan produk, maka akan ada sedikit asimilasi rencana keuangan. Menurut Zulaikah dan Burhany (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan, bahwa “pengadaan barang dan jasa melibatkan pihak lain di luar instansi pemerintahan yaitu pihak ketiga sehingga kemungkinan terjadinya permasalahan pun tidak dapat dihindari”. “Permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa ini akan mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran. Pengadaan barang dan jasa mungkin merupakan operasi yang memakan waktu, tetapi ini hanya karena banyaknya langkah teknis yang harus diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan” (Kuntadi dan Nugroho, 2023). “Lambatnya proses lelang ditambah lagi konflik-konflik yang terjadi selama proses tender

berlangsung semakin memperparah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk implementasi anggaran” (Ramadhani dan Setiawan, 2019).

“Untuk meningkatkan penyerapan anggaran belanja dengan memperhatikan pengadaan barang dan jasa, maka yang harus dilakukan oleh manajemen atau organisasi adalah dengan melakukan perbaikan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat meminimalisasi terjadinya kendala tersebut sehingga dampaknya terhadap penumpukan penyerapan anggaran pun dapat dihindari” (Zulaikah dan Burhany, 2019).

Pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Kuntadi dan Nugroho, 2023), (Yosafat dan Halim, 2022), (Ramopolii et al, 2022), (Rahmawati dan Ishak, 2020), (Ramadhani dan Setiawan, 2019), dan (Zulaikah dan Burhany, 2019).

2. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Kualitas SDM berpengaruh atas penyerapan anggaran belanja, bahwa dalam hal ini kemampuan ASN sebagai SDM dalam pemerintahan Orang-orang yang terampil dilihat dari lurusnya pengajaran sesuai bidangnya, dan mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus yang normal, serta menumbuhkan pengalaman yang dimilikinya dan terbuka lebarnya pintu yang didapatnya. Karyawan dengan gelar tinggi, pengalaman profesional, dan keahlian teknis lebih mungkin berhasil menerapkan perubahan dan inovasi baik secara internal maupun eksternal. Artinya, asosiasi atau kantor dengan pekerja yang memiliki kualitas dan kinerja dapat mencapai tingkat penyerapan anggaran yang baik (Syahwildan dan Damayanti, 2022). Hal ini juga dikemukakan oleh Ramopolii et al (2022) bahwa “dimana semua SDM yang khususnya mengikuti proses pengadaan barang dan jasa harus memiliki kompetensi dan bersertifikasi agar bisa melaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien, dan transparan serta terhindar dari praktik korupsi, kolusi, gratifikasi, dan nepotisme”. “Fungsi pemerintah sebagai bagian dari SDM dapat dicapai melalui prakteknya dalam kegiatan pemerintah sebagai pengelola dan pelaksana keuangan negara dalam penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, hal ini menyatakan bahwa baik atau buruknya kualitas SDM dapat mempengaruhi peningkatan ataupun penurunan penyerapan anggaran” (Kennedy et al, 2020).

“Permasalahan SDM bermuara dari penugasan sebagai tim kegiatan tambahan yang menganggap hal tersebut hanya sebagai pekerjaan sampingan di luar pekerjaan pokok sehari-hari, sehingga kurang optimal dalam melaksanakannya. SDM sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan penganggaran dipandang pada peran manusia sebagai Satker yang memiliki tugas salah satunya sebagai tim pengadaan barang dan jasa yang harus memahami dengan baik tata cara dan prosedur teknis pengadaan barang dan jasa” (Kennedy et al, 2020). Kualitas SDM berdampak atas penyerapan anggaran belanja, ini sama seperti studi yang dilaksanakan: (Syahwildan dan Damayanti, 2022), (Ramopolii et al, 2022), (Tamrin dan Gunawan, 2021), (Rahmawati dan Ishak, 2020), (Kennedy et al, 2020), (Zulaikah dan Burhany, 2019), dan (Yanuriza et al, 2019).

3. Pengaruh Pencatatan Administrasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Pencatatan administrasi berdampak atas penyerapan anggaran belanja, dimana “pencatatan administrasi sangat dibutuhkan untuk dipakai guna, bukti pencatatan, pengambilan keputusan, dan pelaporan sehingga dapat mempengaruhi penyerapan anggaran dengan baik” (Yanuriza et al, 2019). Tetapi, “ada beberapa faktor yang menghambat proses

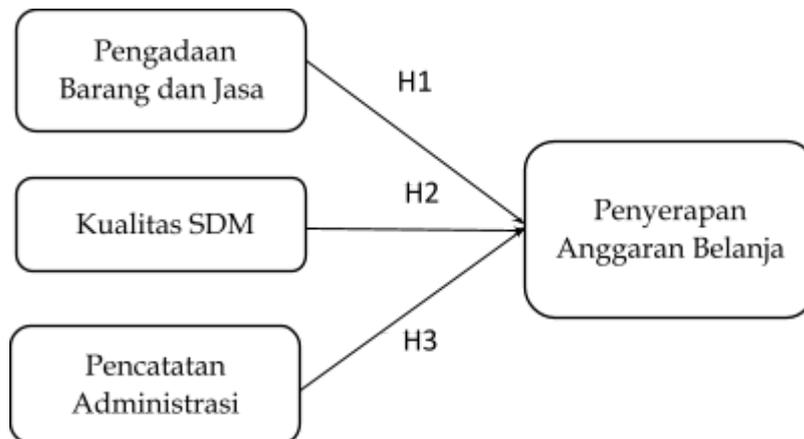
pencatatan administrasi yaitu masa penyusunan dan penelaahan anggaran yang terlalu pendek sehingga kesulitan dalam mempersiapkan data pendukung, kurangnya pemahaman terhadap peraturan mengenai mekanisme pembayaran, dan masa penyusunan dan penelaahan anggaran yang terlalu pendek sehingga kesulitan dalam mempersiapkan data pendukung” (Ramopolii et al, 2022).

Guna menaikkan penyerapan anggaran belanja dengan memperhatikan pencatatan administrasi, maka yang perlu dilaksanakan adalah memaksimalkan koordinasi dan menyiapkan data pendukung dengan sebaik-baiknya.

Pencatatan administrasi berdampak atas penyerapan anggaran belanja, ini sama seperti studi yang dilaksanakan: (Syahwildan dan Damayanti, 2022), (Ramopolii et al, 2022), (Tamrin dan Gunawan, 2021), (Rahmawati dan Ishak, 2020), (Kennedy et al, 2020), dan (Yanuriza et al, 2019).

KERANGKA KONSEPTUAL

Mengingat definisi masalah, pengujian hipotesis, eksplorasi masa lalu yang tepat dan penting serta pembahasan dampak antar faktor, struktur artikel ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Atas dasar gambar *conceptual framework* di atas, pengadaan barang serta jasa, kualitas SDM, serta pencatatan administrasi berdampak atas penyerapan anggaran belanja. Selain dari tiga variabel eksogen ini yang memengaruhi penyerapan anggaran belanja, masih ada variabel lain yang memberi dampak, antaranya ialah:

- Perencanaan Anggaran: (Kuntadi dan Nugroho, 2023), (Syahwildan dan Damayanti, 2022), (Ramopolii et al, 2022), (Kuntadi dan Rosdiana, 2022), (Yosafat dan Halim, 2022), (Tamrin dan Gunawan, 2021), (Rahmawati dan Ishak, 2020), (Kennedy et al, 2020), (Ramadhani dan Setiawan, 2019), (Zulaikah dan Burhany, 2019), dan (Yanuriza et al, 2019).
- Partisipasi Anggaran: (Kuntadi dan Nugroho, 2023).
- Peraturan: (Kuntadi dan Rosdiana, 2022), (Yosafat dan Halim, 2022), (Rahmawati dan Ishak, 2020), dan (Ramadhani dan Setiawan, 2019).
- Koordinasi: (Kuntadi dan Nugroho, 2023).

- e. Revisi Anggaran: (Yosafat dan Halim, 2022).
- f. Pelaksanaan Anggaran: (Syahwildan dan Damayanti, 2022), (Rahmawati dan Ishak, 2020), dan (Zulaikah dan Burhany, 2019).
- g. Ganti Uang Persediaan: (Ramopolii et al, 2022).
- h. Komitmen Organisasi: (Kennedy et al, 2020) dan (Yanuriza et al, 2019).
- i. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: (Kennedy et al, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Atas dasar teori, artikel yang relevan serta pembahasan bisa dirumuskan hipotesis untuk riset yang akan datang:

1. Pengadaan barang dan jasa berdampak atas penyerapan anggaran belanja.
2. Kualitas SDM berdampak atas penyerapan anggaran belanja.
3. Pencatatan administrasi berdampak atas penyerapan anggaran belanja.

Saran

Mengingat tujuan di atas, gagasan dalam artikel ini adalah bahwa ada banyak elemen berbeda yang memengaruhi retensi rencana keuangan, selain perolehan tenaga kerja dan produk, sifat SDM, dan catatan resmi di berbagai jenis dan tingkat asosiasi atau organisasi, selanjutnya masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mencari berbagai elemen yang dapat mempengaruhi asimilasi rencana keuangan selain faktor-faktor yang dianalisis dalam artikel ini.

Faktor-faktor yang berbeda ini, misalnya, perencanaan anggaran, partisipasi anggaran, peraturan/regulasi, koordinasi, revisi anggaran, pelaksanaan anggaran, ganti uang persediaan, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah.

REFERENSI

- Agus, P. (2018). Mudah Memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bandung: Fokusmedia (Anggota IKAPI).
- Ahwan, A. (2022). Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Banga, W. (2018). Kajian Administrasi Publik Kontemporer Konsep, Teori, dan Aplikasi Edisi Revisi. Yogyakarta: Gava Media.
- Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.
- Irianto, B., K. (2021). Mengapa Belanja Pemerintah Selalu Meningkatkan di Akhir Tahun?. OPINI: CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20211223183110-14-301570/mengapa-belanja-pemerintah-selalu-meningkat-di-akhir-tahun>
- Kennedy, Azlina, N., Julita, Nurulita, S. (2020). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, Vol. 13, No. 2, Hal. 108-117. <https://doi.org/10.35143/jakb.v13i2.3652>
- Kuntadi, C., & Dwiasri, D., F. (2022). Manajemen Keuangan Pemerintah Pusat Era Industri 4.0. PT Penerbit IPB Press.
- Kuntadi, C., & Nugroho Adi, D. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran: Perencanaan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Serta Partisipasi Anggaran. JIMT: Jurnal Ilmu Mnaajemen Terapan, Vol. 4, No. 3, Hal. 332-337. <https://doi.org/10.31933/jimt.v4i3>
- Kuntadi, C., & Rosdiana, D. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan: Perencanaan Anggaran, Peraturan, Koordinasi (*Literature Review*). JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, Vol. 4, No. 2, Hal. 142-152. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i2>
- Oktaliza, Y., Ahyaruddin, M., & Putri, M., A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal, Vol. 1, No. 2., Hal. 81-90. <https://doi.org/10.37859/mrabj.v1i2.1918>
- Putri, A., D. (2022). Mengenal IKPA, SMART, dan IKU PKPA. Artikel DJKN. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15719/MENGENAL-IKPA-SMART-DAN-IKU-PKPA.html>
- Putri, M., K., V., & Gischa, S. (2021). Administrasi: Pengertian, Tujuan, Ciri-Ciri, Fungsi, dan Jenisnya. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/18/154901669/administrasi-pengertian-tujuan-ciri-ciri-fungsi-dan-jenisnya>

- Ramadhani, R., & Setiawan Angelina, M. (2019). Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *JEA: Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 1, No. 2, Seri B, Hal. 710-726. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.104>
- Ramopolii Virginia, J., Rate Van, P., & Maramis, B., J. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol. 10, No. 1, Hal. 1409-1420. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i1.39453>
- Sulistiyowati, C., Fariyah, E., & Hartadinata, S., O. (2020). *Anggaran Perusahaan Teori dan Praktika*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Syahwildan, M., & Damayanti, I. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. *Ikraith Ekonomika*, Vol. 5, No. 1, Hal. 169-176.
- Syamsuddin, I., Muhammad, N., P., & Karim., A. (2022). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020. *YUME: Journal of Management*, Vol. 5, No. 2, Hal. 170-177. <https://doi.org/10.37531/yum.v5i2.1557>
- Tamrin, M., & Gunawan, H. (2021). Analisis Perencanaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran APBD Melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng. *Bata Ilyas Educational Management Review*, Vol. 1, No. 2, Hal. 34-50.
- Yanuriza, Hasan, A., & Rasuli, M. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran PNBK Kegiatan Pengamanan Objek Vital Pada Satker Jajaran Polda Riau. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 27, No. 4, Hal. 409-423. <http://je.ejournal.unri.ac.id/>
- Yosafat CH, R., & Halim, A. (2022). Analisis Penyerapan Anggaran Belanja Pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Studi Penyerapan Tahun 2017-2019). Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
- Zulaikah, B., & Burhany Imanina, D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran Pada Triwulan IV di Kota Cimahi. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, Vol.10, No.1, Hal. 1221-1234. <https://doi.org/10.35313/irwns.v10i1.1450>